

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
1. Metode Pendekatan	14
2. Spesifikasi Penelitian	14
3. Tahap Penelitian	15
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Metode Analisis.....	16
BAB II RUANG LINGKUP KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN, SERTA TINJAUAN UMUM TENTANG STATUS BADAN HUKUM	
A. Asas, Fungsi, dan Peran Koperasi Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian	17
1. Pengertian Koperasi	17
2. Landasan dan Asas Koperasi.....	19
3. Tujuan Koperasi	20
4. Fungsi dan Peran Koperasi.....	22
5. Nilai Pada Koperasi.....	22
6. Prinsip Koperasi	25
7. Pembentukan Koperasi.....	30
8. Tugas dan Wewenang Perangkat Organisasi Koperasi.....	35
9. Modal Koperasi	39
10. Selisih Hasil Usaha Koperasi.....	45
11. Perbandingan Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.....	46

B.	Tinjauan Umum Status Badan Hukum Pada Koperasi	49
1.	Pengertian Badan Hukum.....	49
2.	Teori Badan Hukum	52
3.	Penggolongan Badan Hukum.....	56
4.	Karakteristik Badan Hukum Menurut Doktrin.....	58
BAB III ASPEK-ASPEK YANG BERKAITAN DENGAN PENETAPAN STATUS BADAN HUKUM PADA KOPERASI PASCA DIKELUARKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-IX/2013 YANG MEMBATALKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN		
A.	Kendala Koperasi Untuk Berkontribusi Dalam Perekonomian Nasional ..	63
B.	Alasan Pemerintah Melakukan Pembaharuan Hukum Terhadap Undang-Undang Perkoperasian.....	65
C.	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	68
1.	Pokok Permohonan Para Pemohon	68
2.	Tanggapan Pemerintah Atas Pokok Permohonan Para Pemohon	73
3.	Tanggapan DPR RI Atas Pokok Permohonan Para Pemohon	78
4.	Tanggapan Dan Kesimpulan Mahkamah Konstitusi Atas Pokok Permohonan Para Pemohon	82
a.	Tanggapan Mahkamah Konstitusi Atas Pokok Permohonan Para Pemohon.....	82
b.	Kesimpulan Mahkamah Konstitusi Atas Pokok Permohonan Para Pemohon.....	87
BAB IV ANALISIS TERHADAP STATUS BADAN HUKUM KOPERASI PASCA DIKELUARKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-IX/2013 YANG MEMBATALKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN		
A.	Penyebab Mahkamah Konstitusi Membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Terkait Status Badan Hukum Pada Koperasi.....	89
B.	Prospek Hukum Yang Akan Muncul Apabila Terhadap Koperasi Ditetapkan Berstatus Badan Hukum	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN		
A.	Simpulan	137
B.	Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA		